BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti melakukan penelitian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupeten Blitar yang beralamat di Jalan Raya Kedini No. 18, Blitar. Batas wilayah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupeten Blitar yaitu berbatasan dengan Desa Kalipucung di sebelah barat, berbatasan dengan Desa Sanan Kulon di sebelah selatan, dan berbatasan dengan Kelurahan Pakunden Kota Blitar di sebelah utara dan timur. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu lembaga dinas yang bertugas menjalankan urusan Pemerintah Daerah dalam bidang perindustrian dan perdagangan.

1. Visi dan Misi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupeten Blitar merupakan salah satu lembaga yang berlandaskan pada azas otonomi daerah. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupeten Blitar merupakan organisasi pelayanan masyarakat yang dituntut melakukan pelayanan dengan baik sekaligus mendukung tercapainya visi dan misi Bupati Blitar.

a. Visi

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupeten Blitar dalam rangka mendukung visi Bupati Blitar Tahun 2021 – 2024 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur”.**

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Bupati Blitar, maka misi yang ditetapkan Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan takwa dengan kearifan lokal budaya.
2) Meningkatkan taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.
3) Pengoptimalan kinerja Pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.
4) Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, maka susunan organisasi dan tata kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1

Susunan Organisasi dan Tata Kelola

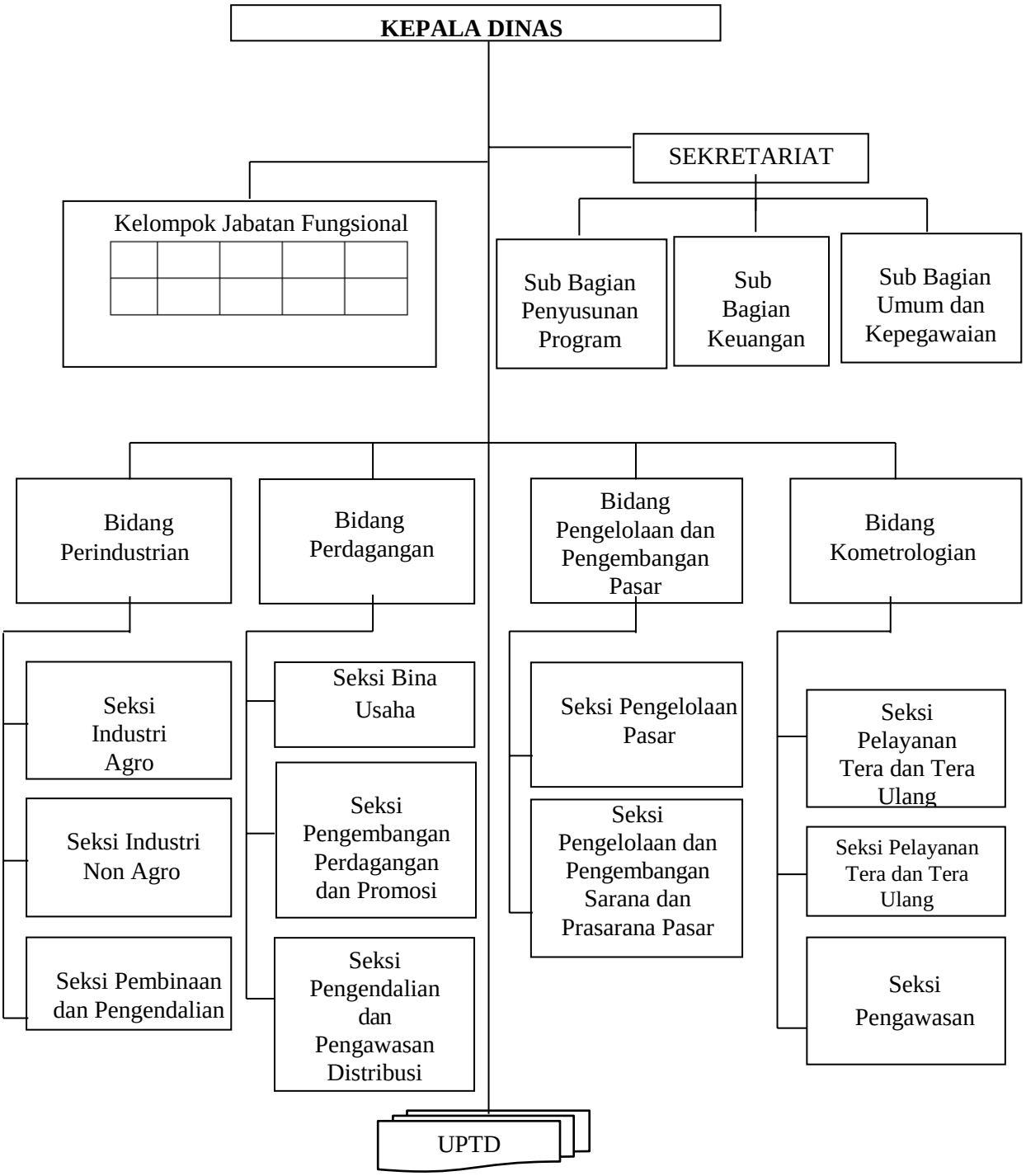

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, (diolah), 2021

B. Paparan Data

1. Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang berisi perbandingan antara anggaran dengan realisasi selama satu periode pelaporan. Informasi pada LRA berguna untuk pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan pemerintah daerah pada peraturan. LRA menginformasikan prediksi sumber daya yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang.[1] Pada penelitian ini, LRA digunakan untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dari LRA inilah akan diketahui bagaimana pelampauan pendapatan dan penghematan belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sehingga dapat menimbulkan adanya SiLPA.

Menurut Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, mendefinisikan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode anggaran. Menurut Nurussakinah (2021) kinerja pengelolaan keuangan diukur dari pencapaian kinerja pengelolaan keuangan yang meliputi target dan realisasi anggaran serta pengaruhnya terhadap perkembangan SiLPA yang berasal dari pelampauan anggaran pendapatan daerah dan penghematan belanja dalam satu periode.

---

[1] Marja Sinurat, *Akuntansi Keuangan Daerah*....., hlm. 126 – 127.

Berikut merupakan tabel pelampauan pendapatan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

Tabel 4.1

Pelampauan Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Pelampauan Pendapatan (Selisih)	Persentase (%)
2016	3.851.099.600	3.273.789.600	(577.310.000)	85,01%
2017	4.083.156.800	3.712.514.600	(370.642.200)	90,92%
2018	4.479.662.192	4.200.245.500	(279.416.692)	93,76%
2019	4.508.634.692	4.889.913.063	381.278.371	108,46%
2020	4.461.134.692	3.607.260.900	(853.873.792)	80,86%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, Laporan Realisasi Anggaran, (diolah), 2021

Dari data tabel 4.1 dapat dilihat bahwa pelampauan pendapatan daerah hanya terjadi pada tahun 2019. Sedangkan tahun 2016, 2017, 2018 dan 2020 realisasi pendapatan lebih rendah dari anggaran pendapatan. Jumlah persentase pelampauan pendapatan daerah di tahun 2016 sebesar 85,01%, tahun 2017 persentase pelampauan pendapatan daerah sesbesar 90,92%. Pada tahun 2018 persentase pelampauan pendapatan daerah sebesar 93,76%. Sedangkan tahun 2020 persentase pelampauan pendapatan daerah adalah 80,86%. Pada tahun 2019 persentasi pelampauan pendapatan daerah sebesar 108,46%. Pada tahun 2019 inilah nilai SiLPA mengalami peningkatan.

Selain adanya pelampauan pendapatan daerah, berdasarkan penelitian Nurussakinah (2021) indikator SiLPA juga diukur dari penghematan

belanja. Berikut merupakan tabel efisiensi belanja pada Dinas Peridustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar periode 2016 – 2020.

Tabel 4.2

Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2016 – 2020

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Efisiensi (%)
2016	20.830.671.190	19.662.941.827	94,39%
2017	11.552.719.090	10.870.021.615	94,09%
2018	23.721.074.809	20.242.492.105	85,34%
2019	26.306.327.654	22.924.608.424	87,14%
2020	14.769.694.234	13.525.123.359	91,57%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, Laporan Realisasi Anggaran, (diolah), 2021

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Dinas Peridustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar selama periode 2016 – 2020 sudah tergolong efisien dalam pemanfaatan anggaran belanja. Namun, efisiensi inilah yang menjadi salah satu penyebab adanya SiLPA dari 2016 – 2020 karena adanya sisa anggaran belanja di tahun-tahun tersebut. Pada tahun 2016 efisiensi belanja sebesar 94,39%, tahun 2017 efisiensi belanja sebesar 94,09%, pada tahun 2018 efisiensi belanja sebesar 85,34%, pada tahun 2019 efisiensi belanja sebesar 87,14% dan pada tahun 2020 efisiensi sebesar 91,57%. Dari beberapa tahun tersebut, di tahun 2018 dan 2019 merupakan efisiensi belanja yang paling baik. Sehingga di tahun tersebut terjadi SiLPA yang cukup besar.

Dari pelampauan pendapatan dan efisiensi belanja diatas, selama lima tahun terakhir Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mengalami SiLPA yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3

Perkembangan SiLPA Tahun 2016 – 2020

Tahun	Pelampauan Pendapatan (Rp)	Efisiensi Belanja (Rp)	SiLPA (Rp)
2016	(577.310.000)	1.167.729.363	590.419.363
2017	(370.642.200)	682.697.475	312.055.275
2018	(279.416.692)	3.478.582.704	3.199.166.012
2019	381.278.371	3.381.719.230	3.762.997.601
2020	(853.873.792)	1.244.570.875	390.697.083

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, Laporan Realisasi Anggaran, (diolah), 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam periode 2016 – 2020 terdapat SiLPA yang fluktuatif di setiap tahunnya. Pada tahun 2016 terdapat SiLPA sebesar Rp 590.419.363, pada tahun 2017 terjadi SiLPA sebesar Rp 312.055.275. Pada tahun 2018 tejadi SiLPA yang cukup tinggi sebesar Rp 3.199.166.012. Pada tahun 2019 terdapat SiLPA pula sebesar Rp 3.762.997.601. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sehingga besar SiLPA adalah Rp 390.697.083.

2. Analisis Faktor Penyebab SiLPA pada periode 2016 – 2020

Salah satu faktor penyebab adanya SiLPA menurut Usman (2012) yaitu adanya pelampauan pendapatan yang artinya realisasi pendapatan yang melebihi dari anggaran/target selama satu tahun anggaran (*over estimate*). Selain itu, menurut Usman (2012) SiLPA juga disebabkan akibat adanya efisiensi belanja, artinya dalam realisasi belanja tidak melebihi atau lebih kecil dari anggaran/target, sehingga mengakibatkan anggaran tidak terserap dengan baik.

Dari tabel analisis di atas dapat dilihat bahwa penghematan atau efisiensi belanja terjadi di setiap tahun. Selain itu, di tahun 2019 SiLPA disebabkan bukan hanya efisiensi belanja melainkan adanya pelampaun pendapatan daerah. Pada tahun 2016 tidak terjadi pelampauan pendapatan daerah namun terjadi efisiensi belanja daerah sebesar Rp 1.167.729.363. Pada tahun 2017 juga tidak terjadi pelampauan pendapatan daerah namun terjadi efisiensi belanja daerah sebesar Rp 682.697.475. Begitu juga dengan tahun 2018 tidak terjadi pelampauan pendapatan daerah namun terjadi efisiensi belanja daerah sebesar Rp 3.478.582.704. Berbeda halnya dengan tahun 2019 yang mana pada tahun ini terjadi pelampauan pendapatan dan efisiensi belanja dengan jumlah pelampauan pendapatan Rp 381.278.371 sedangkan efisiensi belanja sebesar Rp 3.381.719.230. Sedangkan di tahun 2020 hanya tejadi efisiensi belanja daerah yaitu sebesar Rp 1.244.570.875.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Lilis Yuliani selaku Kepala Sub Bagian Keuangan, terkait adanya SiLPA di tahun 2016 – 2020 dan penyebab SiLPA yaitu sebagai berikut:

a. Apakah realisasi pendapatan melebihi anggaran/target pendapatan tiap tahun?

   "Ya, melehihi kadang tapi *nggak* tiap tahun"

b. Apakah terjadi peningkatan realisasi pendapatan tiap tahun?

   "Nggak, *soale* kita yang tahun kemarin malah turun *nduk*."

c. Apakah realisasi belanja melebihi anggaran belanja tiap tahun?

   "Oo.. *nggak* kalau itu, *nggak* pernah melebihi dari yang sudah dianggarkan kalau belanja."

d. Apakah terjadi peningkatan atau penurunan realisasi belanja tiap tahun?

   "Kadang *ningkat*, kadang turun kan sesuai anggaran yang *dikasihkan*. Bisa dua duanya misal tahun ini 14 milyar tahun 2021 bisa turun 12 milyar *gitu*. Sesuai pagu anggaran yang diberikan Pemda. Intinya sesuai pagu Pemda *yo* kita."

e. Jika terjadi penurunan/kenaikan belanja, faktor apa yang menyebabkan?

   "Faktor yang menyebabkan karena ya *macem-macem kayak contohe* gagal lelang akhirnya *nggak* terserap. Kalau dari 5 tahun ada yang menurun ada yang menaik ini. Yang 2019 DAK *ndak* terserap karena gagal lelang. *Terus* kegiatan lain *kok nggak* bisa *nyerap* ada alasannya sendiri-sendiri. Ada yang salah penganggaran salah penghitungan awal. Beberapa tahun yang sering terjadi *kaya* makan minum *kan* untuk rapat *dianggarne* misal

20 kali rapat *terus* kadang *cuma* 10 atau 15 *kan* sisa jadi *nggak* terserap. Selalu terjadi tiap tahun meskipun sedikit *nggak* bisa terserap 100%. Penyerapan *cuma* 95, 97, 85, 90 *gitu nggak* pernah 100% tergantung keadaan contoh kita *nggak* tahu ada pandemi *corona* perjalanan dinas kadang banyak ternyata ada pandemi ini kita *pake virtual* rapatnya berati *kan* biayanya *dikit akhire ndak* terserap. *Terus* yang gagal lelang diperkirankan maksimal tanggal sekian sudah harus ada pemenang *sampek* tanggal *segitu ee*.. CV yang masuk mengajukan lelang *nggak* ada yang masuk nominasi. Jadi waktu ditentukan sampai tanggal 25 harus ada pemenang kita belum dapat akhirnya dana *nggak* terserap itu. Akhirnya anggaran kita jadi SiLPA *nggak* bisa terserap.“

f. Bagaimana perkembangan SiLPA selama 5 tahun terakhir?

“Selalu ada sisa tiap tahun, selalu ada. Yang tinggi di tahun 2018 *sama* 2019 lainnya ada nggak *tinggi* sampek milyar *gitu nggak*. Soalnya *alasane* itu tadi *ya nggak* ada pemenang nominasi akhirnya gagal lelang. Akhirnya SiLPA tinggi pada saat itu.”

g. Faktor apa yang menyebabkan adanya SiLPA?

“*Laa*... itu tadi sama kayak yang *tak* bicarakan tadi itu *mbak*. Sebabnya *yaa* sama *kayak* tadi.”

h. Faktor apa yang menyebabkan kenaikan SiLPA?

“*Nah* itu tadi sama karena gagal lelang yang *bikin* naik.”

i. Bagaimana indikator keuangan jika dilihat dari SiLPA?

"*Udah* bagus belanjanya, *udah* diatas 90% yang gak sampek 90 itu tadi tahun 2018 dan 2019 yang SiLPAnya *sampek* tinggi itu tadi. Kalau yang pendapatan kita *nggak* pernah di atas target, *yaa* pernah *cuma* tahun berapa itu, *nggak* tiap tahun pokoknya."

j. Jika terdapat SiLPA di tahun sebelumnya, bagaimana penggunaan sisa dana tersebut untuk tahun depan?

"SiLPA itu berati anggarannya masuk ke sana ke Pemda sana kembali ke Kasda. *Nggak dipake* di tahun berikutnya. Jadi tiap akhir tahun harus nol kita. Jadi kita *cuma* ada sekian persen penyerapan."

Terkait adanya penghematan belanja di setiap tahun maka peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Evy Kusdianawati selaku Bendahara Pengeluaran terkait belanja daerah tahun 2016 – 2020 sebagai berikut:

a. Apakah realisasi belanja melebihi anggaran belanja tiap tahun?

"Jawabannya tidak. Tiap tahun itu belanjanya *nggak* pernah melebihi anggaran, Mbak."

b. Apakah terjadi peningkatan atau penurunan realisasi belanja tiap tahun?

"Kedua-duanya Mbak. Bisa meningkat bisa menurun seperti yang *covid* itu kita belanjanya malah turun."

c. Jika terjadi penurunan/kenaikan belanja, faktor apa yang menyebabkan?

"Ada anggaran yang tidak terserap, lambatnya pelaksanaan kegiatan *terus* pagu anggaran kita tinggi itu ada di tahun 2019 itu pagunya tinggi *lha* kita belanjanya *nggak sampek segitu* kita salah *ngira-ngira* anggaran

belanjanya. *Terus* ada juga gagal lelang seingat saya tahun 2018 dulu pernah gagal lelang *buat* beli mesin penggiling padi. Kalau yang karena *covid* ini yang 2020 kita pagu anggarannya *udah* turun dari tahun sebelumnya tapi pengeluaran kita *nggak* terserap banyak. Adanya *social distance* ini *kan* membuatkan kita harus rapat-rapat *virtual* sama WFH juga jadi *nggak* banyak terserap."

d. Apakah hal tersebut dapat menjadi penyebab SiLPA?

"Iya, bisa jadi salah satu penyebab SiLPA. Yang paling kerap terjadi di pelaksanaan kegiatan itu, Mbak. Itu tahun 2016 dan 2017 juga *kan ya* yang *sampean* teliti. *Nah* itu beberapa kegiatan yang harusnya kita selesaikan beberapa kali *gitu ya* malah *cuma* malah gak sesuai targetnya, akhirnya *wes* sisa dananya."

e. Bagaimana indikator keuangan jika di lihat dari efisiensi belanja?

"*Udah* efisien *sih* itu Mbak bisa dilihat di LRA itu udah sampek 90 an rasionya *yaa* tapi ada yang masih di bawah 90 itu karena ada dana *nggak* terserap Mbak, tapi rata-rata bisa 90 an *kok*."

Selain itu, terkait adanya pelampauan pendapatan maka peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Siti Musrikah selaku Bendahara Penerimaan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Apakah realisasi pendapatan melebihi anggaran pendapatan tiap tahun?

"Mulai 2016 ya itu..... yang tahun 2020 *nggak* terpenuhi kemudian tahun 2016, 2017, 2018 juga *enggak*. Itu *cuma* tahun 2019 *aja* terpenuhi Mbak. Yang angka di atas 100 itu terpenuhi lainnya kita belum Mbak."

b. Apakah terjadi peningkatan realisasi pendapatan tiap tahun?

"*Nggak* selalu, kadang bisa naik bisa turun tergantung apa itu, pemasukan. Kadang kalau ada orang jualan *gitu ya* retribusinya naik, kita *kan* pemasukkannya dari retribusi juga. 2018 sama 2019 kita retribusinya terpenuhi *malah* lebih. Terus di tahun 2020 turun drastis karena ada pandemi orang-orang *pada nggak* jualan, itu jadi retribusinya jadi minim."

c. Jika pada tahun 2019 terjadi pelampauan pendapatan faktor apa yang menyebabkan?

"Ya itu tadi, Mbak. Karena retribusi, *kalau* orang-orang *gak* jualan *kan* mereka *nggak* bayar retribusi. Dan kita di tahun 2019 itu retribusinya melampaui targetnya *gitu*."

d. Apakah pelampauan pendapatan bisa menjadi penyebab SiLPA?

"Bisa, tapi saya rasa *nggak* banyak mungkin pengaruhnya. *Soalnya* pendapatan kita jarang terpenuhi *malah* lima tahun terakhir ini *cuma* sekali terpenuhinya."

e. Bagaimana indikator keuangan jika di lihat dari pendapatan?

"Ya itu tadi bisa *sampean* simpulkan ya kalau *nggak* terpenuhi atau kurang dari 100 ya memang kurang bagus kita dari sisi pendapatan, salah satunya karena retribusi tadi."

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada ketiga narasumber diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. SiLPA selalu terjadi di setiap tahun termasuk lima tahun terakhir yaitu periode 2016 – 2020. Sedangkan angka SiLPA tertinggi berada di tahun 2018 dan 2019.

b. Secara umum belanja daerah sudah efisien karena realisasi berada di bawah anggaran belanja. Namun, hal tersebut tidak selalu berdampak positif karena efisiensi belanja dapat mendorong terjadinya SiLPA pada akhir tahun anggaran.
c. Penyebab SiLPA dari tahun 2016 – 2020 diantaranya berkaitan dengan belanja daerah yang mana beberapa kegiatan tidak terlaksana sehingga menyebabkan penyerapan anggaran tidak maksimal. Hal ini terjadi di tiap tahun anggaran. Selain tidak terlaksananya kegiatan ada pula lambatnya pelaksanaan kegiatan seperti halnya pelaksanaan kegiataan untuk tahun berikutnya. Tidak hanya itu, penyebab SiLPA bisa terjadi karena akibat dari gagal lelang untuk pengadaan peralatan.
d. Pelampauan pendapatan tidak sepenuhnya terjadi selama 5 tahun terakhir. Pelampauan pendapatan hanya terjadi di tahun 2019 saja.
e. Selain itu, SiLPA disebabkan karena pelampauan pendapatan di tahun 2019 namun hal tersebut tidak menjadi faktor utama dalam penyebab SiLPA karena pelampauan hanya terjadi di tahun 2019 jika diukur dari 5 tahun terakhir.